

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang

Sabam Simbolon^{1)*}, Ety Herijawati²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41, Kota Tangerang, Indonesia

¹⁾bolonzaba@gmail.com

²⁾etty.herijawati@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima 11 Mei 2022;
Perbaikan 1 Juni 2022;
Diterima 12 Juni 2022;
Tersedia online 21 Juni 2022.

Kata kunci:

Kualitas Penduduk
Pendapatan Perkapita
Inflasi
Pajak Daerah
Pertumbuhan Ekonomi

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak daerah di kota Tangerang. Pajak daerah cukup beragam diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan lainnya sesuai dengan Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi jumlah penduduk, pendapatan per-kapita, inflasi, pertumbuhan kredit, dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian adalah metode deskriptif dengan menggunakan data statistik BPS Kota Tangerang, dengan analisa deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana pertumbuhan penduduk memiliki koefisien negatif, yaitu negatif 0,393 yang artinya pertumbuhan penduduk berdampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah, namun tidak signifikan. Faktor pendapatan per kapita juga menunjukkan koefisien negatif terhadap penerimaan pajak di kota Tangerang yaitu negatif 0.068, dengan tingkat signifikansi 0,831, artinya bahwa pendapatan perkapita penduduk kota Tangerang berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah kota Tangerang. Sedangkan faktor inflasi juga menunjukkan koefien negatif 3.215, dengan tingkat signifikansi 0,00, artinya inflasi berpengaruh signifikan untuk menurunkan penerimaan pajak daerah. Kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dianggap signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang adalah tingkat inflasi, sedangkan faktor lainnya berpengaruh tetapi tidak signifikan. Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah daerah dapat membuat kebijakan akan tingkat inflasi lebih rendah, dan meningkatkan kualitas penduduk, memperluas usaha dan kesempatan kerja bagi warga kota Tangerang sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat kota Tangerang semakin tinggi, dan memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menitikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan

penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Banten sebagai daerah-daerah otonom, dan merupakan provinsi yang dimekarkan dari provinsi Jawa Barat, dituntut mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tanpa tergantung pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam peningkatan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi & Eno, 2008). Penerimaan PAD digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk itu setiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Untuk mengoptimalkan PAD ada beberapa pos pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Menurut (Koswara E, 2015), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Konsekuensi dari penerapan daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penerapan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Adapun jenis-jenis pajak Daerah Tingkat I, antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis-jenis pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Ada perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang meliputi tujuh pajak Kabupaten/Kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian Golongan C. Pajak bagi pemerintah daerah

berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga alat pengatur keuangan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan–kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang–barang publik.

Kota Tangerang merupakan daerah yang cukup strategis untuk pusat perekonomian, yang berdampingan dengan Ibu Kota Negara Indonesia yaitu DKI Jakarta. Salah satu penerimaan daerah di Kota Tangerang adalah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kota Tangerang pajak daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: pajak penghasilan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Dengan banyaknya sumber pajak daerah yang dimiliki pemerintah daerah, maka Kota Tangerang memiliki peluang untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Berdasarkan data BPS Kota Tangerang, diperoleh data bahwa pajak daerah merupakan penyumbang utama PAD Kota Tangerang. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Tangerang Tahun 2010-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Besarnya Kontribusi (%)
2010	159 764	230.634	68,84
2011	418.529	499.600	83,77
2012	516 453	631.519	81,78
2013	643.426	815.733	78,88
2014	1 054 756	1 258 738	83,79
2015	1.172.374	1.472.049	79,64
2016	1 300 153	1 590 393	81,75
2017	1 566 506	1 991 899	78,64
2018	1.551 439	1 864 386	83,21
2019	1 877 851	2 195 869	85,52

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan 2019 berada antara 68 % - 86 % selama kurun waktu 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi yang paling besar tercapai pada tahun 2011, yaitu 83,77 % , tahun 2014 sebesar 83,79 dan tahun 2018 sebesar 83,21 % dan tahun 2019 sebesar 85,52 %. Banyak sedikitnya kontribusi pajak pada penerimaan pajak daerah berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak. Hal ini diperkuat dengan pendapat (Lains & Alfian, 1985) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD disebabkan oleh terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah, hal ini sebagai akibat dijadikannya pajak–pajak yang hasilnya besar sebagai pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga, tinggi rendahnya realisasi perolehan PAD sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya realisasi perolehan pajak daerah.

Berdasarkan teori perpajakan, (Musgrave et al., 1989) besar kecilnya penerimaan di sektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. (Wantara & Agus, 1997) mengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Pembangunan yang mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah tidaklah mampu menyediakan output yang dibutuhkan secara cepat, dalam keadaan demikian kenaikan tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga, karena diperkirakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Oleh karena itu dengan adanya laju inflasi atau prosentase tingkat harga maka dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Disini pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak, sehingga permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan). Begitu pula dengan kenaikan biaya secara tiba-tiba jika didukung oleh perluasan pemerintah, maka akan mendorong kenaikan harga, selanjutnya mengakibatkan kenaikan upah yang diperlukan untuk mengimbangi biaya (inflasi akibat penawaran). Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita,

masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak, sebab dengan meningkatnya perekonomian akan mendorong peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan, yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan dibidang keuangan.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang duatur dengan undang-undang tanpa imbalan agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk menjalankan roda pemerintahan (Rochmat & Soemitro, 1992). Pernyataan mengenai hak negara memungut pajak terhadap rakyat beserta dasar keadilannya merupakan pertanyaan yang mendasar, mengingat setiap pemungutan pajak dengan nama apapun yang dilakukan oleh negara akan mengurangi kemampuan ekonomi seseorang, membatasi daya beli dan dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang.

Pajak daerah menurut (Prana R, 2016), hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumhatangga sendiri. Konsekuensinya salah satu pelaksanaannya bergantung pada kemampuan ekonomi meliputi tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan daerahnya keuangan daerahnya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan sumber-sumber untuk menggali keuangannya sendiri.

Tabel 2. Literature Review

No	Judul	Alat Analisis	Variabel	Hasil
1	(Sasana, 2005), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)	Regresi Linier Berganda	PDRB, Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Inflasi, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, Krisis Moneter	Secara silmutan variable PDRB, wajib pajak, tingkat inflasai, luas lahan, jumlah bangunan dan krisis moneter berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten banyumas. Variabel jumlah bangunan mempunyai pengaruh paling besar dengan nilai kaefisien regresi sebesar 3,599 Variabel krisis moneter berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
2	(Susanto & Maskie, 2013), Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Malang)	Regresi Linier Berganda	Jumlah Penduduk, PDRB, Tingkat Inflasi	Secara bersama-sama variable PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD kota malang Variable PDRB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan Variable tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD kota malang
3	(Liberty, 2013), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Regresi Linier Berganda dengan	Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Industri	Variabel jumlah industry dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di

	Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember	Metode OLS		kabupaten Jember Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan
4	(Nadya Fazriana Haniz & Hadi Sasana, 2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	Regresi Linear Berganda dengan Metode PLS	Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi	Variable wajib pajak, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten tegal Variable inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten tegal
5	(Helti, 2010), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektifitas dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)	Regresi Linier Berganda, Analisis Ratio	Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB	Pemungutan pajak pada tahun 2002-2008 sangat efisien dan efektif Variabel inflasi dan PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten Karanganyar

Adapun literature review dari penelitian terdahulu, ada 5 penelitian terdahulu yang dijadikan landasan pada penelitian ini rinciannya terdapat pada table 2.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang dengan pertimbangan bahwa Kota Tangerang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series periode 2010-2021. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (Regresi Linier berganda).

Berikut analisis regresi menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi berganda:

$$YLn = Ln\beta_0 + \beta_1LnWP + \beta_2LnPKAPITA + \beta_3LnINF + \beta_4LnKre + \beta_5LnPEK + e$$

Keterangan :

WP = variabel wajib pajak/jumlah penduduk

PKAPITA = variabel pendapatan perkapita

INF = variabel inflasi

Kre = pertumbuhan Kredit

PEK = pertumbuhan ekonomi

β_{1234} = koefisien regresi

e = faktor pengganggu.

Dengan kriteria pengujian, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal.

Deteksi multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika ada kecenderungan adanya multikolinier maka salah satu variabel memiliki gejala multikolinier. Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*varians inflation factor*) pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai *VIF*nya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala multikolinier. Deteksi ini menggunakan SPSS dengan analisis *Collinearity Statistics*.

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi gangguan yang diakibatkan faktor-faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika varians berbeda disebut homokedastisitas model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* menunjukkan bahwa model regresi tidak terkena heteroskedastisitas, dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Masalah ini timbul karena

adanya residual (kesalahan pengganggu) tak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu *Uji Durbin-Watson (DW test)*.

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda, dimana dalam analisis regresi tersebut akan menguji pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pengolahan data menggunakan SPSS dengan pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara parsial maupun simultan.

Deteksi Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Deteksi statistik T ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual.

$H_0: \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_i > 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Deteksi Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pendeteksi ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi α sebesar 5% atau 0,05 maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

Bila nilai signifikansi $f_{hitung} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Bila nilai signifikansi $f_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Analisis ini menggunakan Uji R^2 dengan Model Summary.

IV. HASIL

UJI DESKRIPTIF Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghozali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa masing-masing pengamatan menunjukkan nilai minimum, standard maksimum dari 10 (sepuluh) tahun pengamatan. Pertumbuhan penduduk paling rendah adalah negative 1895, maksimum 702 dan rata-rata 78.1. Pendapatan masyarakat yang diprosikan dengan pendapatan perkapita juga menunjukkan pertumbuhan paling minimal negatif 2717, maksimum 5601 dengan rata-rata 888.8.

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Penduduk/wajib pajak	10	-1895.00	702.00	78.1000	710.02605
Pendapatan per kapita	10	-2719.00	5602.00	888.8000	2347.79664
Inflasi	10	-3783.00	1746.00	-.1000	1415.14793
Pertumbuhan kredit	10	-1314.00	5823.00	2120.5000	2330.54940
Pertumbuhan ekonomi	10	-2287.00	1628.00	194.6000	1259.14099
Pajak daerah	10	-96.00	16197.00	3178.3000	4952.31804
Valid N (listwise)	10				

Senagkan inflasi menunjukkan pertumbuhan paling rendah negative 3783, maksimum 1746 dan rata-rata -0.1. Selanjutnya pertumbuhan kredit menunjukkan pertumbuhan paling rendah negatif 1314, maksimum 5823, dengan rata-rata 2120.5. Dan pertumbuhan perekonomian kota Tangerang paling minimum sebesar negative 2287, paling maksimum 194,60 dan rata-rata sebesar 194.6. Kemudian pertumbuhan penerimaan pajak daerah paling minimum negative 96, maksimum 16197, dan rata-rata sebesar 3178.3. Dengan demikian bahwa pertumbuhan setiap pengamatan mengalami penurunan di kota Tangerang selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun belakangan.

Uji normalitas digunakan untuk apakah data terdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan grafik. Normal tidaknya data dapat dideteksi juga level plot grafik histogram. Uji normalitas dengan menggunakan alat uji analisis metode Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov, dapat dilihat seperti pada tabel 4

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

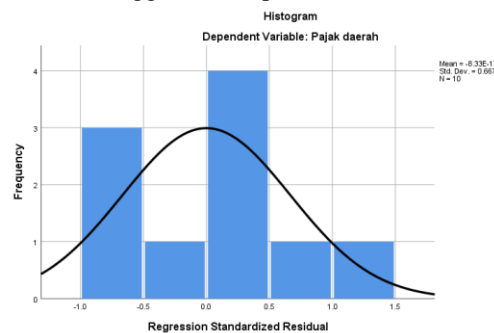
Unstandardized Residual

N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1266.21883839
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.164
	Negative	-.155
Test Statistic		.164
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dengan dasar apabila probabilitas (sig) > 0,05 berarti data telah terdistribusi secara normal. Pada table 4.8 hasil pengujian SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, maka nilai 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa arah gambar lebih condong ke kanan, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen berdistribusi normal sehingga tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1. Histogram Variabel Dependen

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam hasil regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi antara satu variabel bebas tersebut dengan nilai variabel bebas lainnya.

Tabel 5. Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penduduk/wajib pajak	.946	1.057
	Pendapatan per kapita	.810	1.234
	Inflasi	.725	1.379
	Pertumbuhan kredit	.636	1.572
	Pertumbuhan ekonomi	.489	2.047

a. Dependent Variable: Pajak daerah

Dengan melihat hasil perhitungan kolinieritas seperti yang tampak pada tabel 3, diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF untuk variabel pertumbuhan penduduk sebesar 0,946 dan 1,057; nilai tolerance dan VIF untuk variabel pendapatan perkapita sebesar 0,810 dan 1,234; nilai tolerance dan VIF untuk inflasi sebesar 0,725 dan 1,379; nilai tolerance dan VIF untuk pertumbuhan kredit sebesar 0,636 dan 1,572; dan nilai tolerance dan VIF untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,489 dan 2,047 sehingga seluruh variabel independen pada persamaan regresi mempunyai nilai tolerance < 1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat kolinier yang berarti

dalam hasil regresi untuk model sampel secara keseluruhan (full sample) atau dengan kata lain model regresi terhindar dari masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Pada tabel 4 dapat dilihat uji heteroskedastisitas Glejser diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,148, .651, .980, .392, dan .253 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1098.755	270.354		4.064	.015
	Penduduk/wajib pajak	.467	.261	.507	1.788	.148
	Pendapatan per kapita	.042	.085	.150	.489	.651
	Inflasi	-.004	.150	-.008	-.026	.980
	Pertumbuhan kredit	-.093	.097	-.331	-.958	.392
	Pertumbuhan ekonomi	.273	.205	.527	1.335	.253

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi tinggi antar error satu dengan error lainnya. Artinya kesalahan pengukuran salah satu observasi bergantung pada kesalahan observasi berikutnya atau sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW).

Nilai d_u dan d_l diperoleh dari tabel Durbin Watson, penelitian ini menggunakan jumlah sampel 10 ($n=10$) dan jumlah variabel bebas sebanyak 5 ($k=5$), maka nilai d_l tabel adalah sebesar 0,2427 ($4 - d_l = 3,7563$) dan d_u tabel sebesar 2.8217 ($4 - d_u = 3,3405$). Hal ini berarti $d_u < d < 4 - d_u$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model.

Tabel 7. Uji Autokorelasi -Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.935	.853	1899.32826	.799

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan ekonomi, Penduduk/wajib pajak, Pendapatan per kapita, Inflasi, Pertumbuhan kredit

b. Dependent Variable: Pajak daerah

Dari tabel 7 di atas terlihat nilai Durbin Watson adalah 0,799. nilai tersebut ada pada interval $-2 < DW < 2$. Berarti berada pada daerah yang menyatakan tidak terjadi autokorelasi. Dengan kata lain nilai Durbin Watson adalah sebesar 0,799, maka nilai Durbin Watson berada di antara 0,2427 hingga 2,8217, maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Analisa regresi berganda dalam penelitian ini dirumuskan seperti berikut :

$$Y_{Ln} = \beta_0 + \beta_1 LnWP + \beta_2 LnPKAPITA + \beta_3 LnINF + \beta_4 LnKre + \beta_5 LnPEK + e$$

Keterangan :

WP = variabel wajib pajak

PKAPITA= variabel pendapatan perkapita

INF = variabel inflasi

Kre = Kredit

PEK = variabel pertumbuhan ekonomi

β_{1234} = koefisien regresi

e = faktor pengganggu

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 8 regresi linier berganda untuk penelitian ini di susun seperti berikut.

$$Y = 1149.897 - 0.393 WP - 0.068 KAPITA - 3.215 INF + 0.928 KRE + 0.774 PEK + e$$

Konstanta menunjukkan angka 1149,869 yang artinya penerimaan pajak daerah di kota Tangerang akan berada pada angka 11349,869 walaupun variabel wajib pajak, pendapatan kapita, inflasi, kredit, dan pertumbuhan ekonomi tidak ada. Variabel pertumbuhan penduduk adalah -0,393 yang menunjukkan bahwa jika pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1 poin mengakibatkan pendapatan daerah mengalami penurunan 0,3 poin. Kemudian jika

pendapatan perkapita menunjukkan koefisien - 0,068 yang menggambarkan bahwa jika pendapatan perkapita meningkat satu poin akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 0,068 point.

Tabel 8. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1149.897	949.367		1.211	.292
	Penduduk/wajib pajak	-.393	.917	-.056	-.428	.690
	Pendapatan per kapita	-.068	.300	-.032	-.228	.831
	Inflasi	-3.215	.525	-.919	-6.120	.004
	Pertumbuhan kredit	.928	.341	.437	2.726	.053
	Pertumbuhan ekonomi	.774	.719	.197	1.075	.343

a. Dependent Variable: Pajak daerah

Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa masing-masing variable menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut masing –masing hipotesis dapat dijelaskan berikut ini. Petumbuhan penduduk sebagai wajib pajak menunjukkan pengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang., dimana nilai t hitung negative, dengan tingkat koefisen negatif 0,393 yang artinya jika jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah, namun tidak signifikan karena 0,690 > dari 0,05. Dengan demikian H1=0 ditolak, dengan menerima H1 # 0, dimana jumlah penduduk berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang.

Berikutnya pada tabel 6 Variabel pendapatan perkapita menunjukkan nilai t hitung negative 0,068 dan tingkat signifikansi 0,831. Varibel pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh yang berlawanan, dimana dengan meningkatnya pendapatan perkapita justru menurunkan penerimaan pajak daerah, dengan tidak signifikan. Dengan demikian hipotesa H2=0 ditolak dan menerima H2#0, bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang.

Pada tabel 6 juga menunjukkan, bahwa inflasi menunjukkan nilai t hitung sebesar negative -3.215 dengan tingkat signifikansi 0,004. Jika inflasi meningkat akan berdampak pada turunnya penerimaan pajak daerah secara signifikan, sebab nilai 0,004 < dari 0,05. Dengan demikian, tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang, atau inflasi mengakibatkan penurunan terhadap pajak daerah dengan signifikan.

Selanjutnya penyaluran kredit menunjukkan korelasi positif 0.928 dengan tingkat signifikansi 0,053, artinya penyaluran kredit kepada masyarakat memberikan dampak positif penurunan terhadap penerimaan pajak daerah , namun tidak signifikan, sebab 0,053 > 0,05. Dengan demikian hipotesa H4=0 ditolak,dan menerima H4#0, yaitu bahwa penyaluran kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang.

Kemudian variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,744 dengan tingkat signifikansi 0,343 yang menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, tetapi tidak signifikan. Dari konsisi diatas bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Tangerang secara signifikan selama kurun waktu 2010-2020 adalah tingkat inflasi.

Namun secara bersama-sama pada tabel 9 menunjukkan F hitung sebesar 11.437 dengan tingkat signifikansi 0,017, dimana lebih kecil dari 0,05,dan F hitung 11.437 > F tabel 3,48. Dengan demikian variabel wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi secara bersama sama mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Tangerang secara signifikan terhadap penerimaan pajak di kota Tangerang dalam kurun waktu 2010-2021.

Tabel 9 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206299294.780	5	41259858.956	11.437	.017 ^b
	Residual	14429791.320	4	3607447.830		
	Total	220729086.100	9			

- a. Dependent Variable: Pajak daerah
- b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan ekonomi, Penduduk/wajib pajak, Pendapatan per kapita, Inflasi, Pertumbuhan kredit

Hal ini dapat didukung dengan pengujian koefisien determinasi ini seperti pada tabel 10. Berdasarkan Tabel 10 nilai Koefisien Determinasi (Durbin Watson) pada variabel endogen penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,799, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 79,90 % terhadap penerimaan pajak daerah terikat, sedangkan sisanya yaitu sebesar 20,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Tabel 10. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.935	.853	1899.32826	.799

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan ekonomi, Penduduk/wajib pajak, Pendapatan per kapita, Inflasi, Pertumbuhan kredit

b. Dependent Variable: Pajak daerah

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian pada pragraf di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang tetapi tidak signifikan, artinya bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, dengan efek yang tidak signifikan. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan peningkatan penerimaan pajak daerah, dimana dengan bertambahnya penduduk, akan mengakibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang merupakan objek pajak itu sendiri. Misalnya, peningkatan pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak daerah lainnya. Namun, hal ini bisa diakibatkan bahwa penduduk dengan beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah tertentu, penduduk tidak teradministrasi dengan baik terutama berkaitan sebagai wajib pajak, dan adanya penduduk yang bermigrasi ke tempat lain. Hal ini agak berbeda dengan hasil penelitian Iwan Susanto (2014), Rendra Fahmi (2013) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh penerimaan pajak kendaraan yang masih berafiliasi dengan Ibu Kota Jakarta. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Ika Puspita Nugraheni, 2019 di kota Magelang yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna dari jumlah penduduk terhadap pajak daerah (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini bisa akibat dari kurang produktifnya masyarakat di daerah tersebut.

Seiring dengan peningkatan pembangunan yang ada dalam satu daerah tentu akan membawa dampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, dan seiring hal tersebut akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pendapatan perkapita kota Tangerang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah kota Tangerang, tetapi tidak secara signifikan. Dengan kata lain pendapatan perkapita meningkat, dan penerimaan pajak daerah meningkat, namun belum menunjukkan jumlah yang masih kurang mengembirakan. Secara konsep, dengan meningkatnya pendapatan aktivitas ekonomi tersebut mengakibatkan adanya pertumbuhan pendapatan domestik daerah, dan mengakibatkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong terciptanya transaksi yang merupakan objek pajak daerah seperti pembelian rumah, pembelian kendaraan, pengunjung restoran, atau hiburan. Sehingga dengan peningkatan kegiatan tersebut akan memberikan pemasukan pajak daerah bagi pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rendra Fahmi (2013) yang mengatakan PDRB memiliki pengaruh yang positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tangerang, atau inflasi mengakibatkan penurunan terhadap pajak daerah dengan signifikan. Kenaikan harga-harga akan mendorong masyarakat atau perusahaan untuk mengurangi konsumsi baik barang maupun jasa yang mengakibatkan menurunnya permintaan barang dan jasa yang ditawarkan. Demikian halnya dengan kondisi kota Tangerang, dimana dalam kurun waktu pengamatan menggambarkan dengan tingkat inflasi yang ada mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa semakin menurun, yang mengakibatkan penawaran yang juga menurun, sehingga pajak atas barang dan jasa yang menurun. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat kota Tangerang terdiri dari pekerja yang dengan gaji jumlah tetap. Sehingga inflasi pada dasarnya akan berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran golongan besar masyarakat mengalami kemerosotan. Penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Iwan Susanto (2014), yang menyebutkan bahwa Variabel tingkat

inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD (pajak daerah) kota Malang, dan Nadya Fazriana Haniz (2013), inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Di Indonesia jenis kredit cukup beragam, yaitu kredit investasi, Kredit usaha rakyat, kredit kendaraan, kredit perumahan, dan lainnya, dan kredit tersebut sebagian besar disalurkan melalui perbankan. Pemberian kredit tersebut diharapkan akan mendorong masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha, atau melakukan wira usaha dalam meningkatkan pendapatan sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, akan menimbulkan adanya dan meningkatnya produksi pada sisi lain. Sehingga, objek-objek pajak daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak tentunya. Lain halnya dengan kondisi dalam penelitian ini dimana menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan, bahwa meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, kurang memberikan makna yang signifikan terhadap pajak daerah kota Tangerang, dan kredit kurang produktif.

Pertumbuhan ekonomi kota Tangerang menunjukkan peningkatan yang semakin menurun dalam satu dekade terakhir, bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun ini, dapat diakibatkan kurang optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di kota Tangerang. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang terkait dengan kegiatan yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi daerah seperti produksi barang, jasa, dan kemampuan daya beli masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Penurunan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap menurunnya penerimaan pendapatan daerah itu sendiri, sehingga pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh secara positif tetapi tidak signifikan.

Dari hasil pengujian secara partial ditunjukkan bahwa setiap variabel inflasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, sedang pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Namun, jika secara keseluruhan variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, artinya pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, penyaluran kredit, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di daerah kota Tangerang.

Kondisi ini senada dengan hasil penelitian, secara bersama-sama variabel PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Helti, K. A. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan (studi kasus di Kabupaten Karanganyar). In *Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Koswara E. (2015). Paradigma Baru Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepentingan Rakyat. *Jurnal Widyapraja*, 34.
- Lains, & Alfian. (1985). Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru. *Majalah Prisma*, 40–57.
- Liberty, S. N. (2013). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN JEMBER. *JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER*.
- Musgrave, A., R., & Musgrave, P. B. (1989). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. In *Erlangga*. Erlangga: Jakarta.
- Nadya Fazriana Haniz, & Hadi Sasana. (2014). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TEGAL. *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Prana R. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 4(1).
- Rochmat, & Soemitro. (1992). Pengantar Singkat Hukum Pajak. In *PT. Eresco: Bandung*. PT. Eresco: Bandung.
- Sasana, H. (2005). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)(STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS). *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1), 19–29.
- Suhendi, & Eno. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005. In *Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta*. Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Susanto, I., & Maskie, G. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1090>
- Wantara, & Agus. (1997). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970-1992). In *Pasca Sarjana Universitas atmajaya Yogyakarta*.